PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya)

Oleh:

INDRIANI PUSPITA DEWI AGUSTIN
NIM: 21112086

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email: indriocess@yahoo.co.id

ABSTRACT

A phenomenon happened in KPP Pratama Majalaya *on 2015 (1) tax arrears higher than tax audit, but the income tax can surpass the target, because the delinquent tax admit that they're loss and not obligated to pay the tax (2) amount taxpayer that report the* SPT is lower than *amount taxpayer that registered, tha's because* PPN *income is high.*

Income tax on KPP Pratama Majalaya *is fluctuating every year so many factors that infulence income tax on* KPP Pratama Majalaya *that is tax audit and amount taxpayer. This research intend to knowing the effect of tax audit toward income tax, and amount taxpayer toward income tax.*

The methode that use is descriptive verifikatif methode with a quantitative approach. Sampling techniques that used is saturated sampling. The unit analysis KPP Pratama Majalaya *and observation unit is audit section and admissions section. Analysis Methode that use is multiple linear regression analysis and hypothesis testing in this study using SPSS 16.0 for Windows.*

The Research result show that (1) tax audit have significant effect toward income tax with positive direction, and (2) amount taxpayer have significant effect toward income tax with positive direction.

Keywords : *Tax Audit, Amount Taxpayer, Income Tax*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas – luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (M. Suparmoko, 2013:127). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1:Poin 3).

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Riska, 2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pada 6 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari (Erly Suandy, 2011:101) yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance,* melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah jumlah wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Belinda (2015) penagihan pajak berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014. Dapat disimpulkan semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Wilayah kota bandung dan KPP Sumedang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari (Mardiasmo, 2011:7) yang menyatakan bahwa wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan pajak gagal mencapai target padahal telah dilakukan pemeriksaan pajak.
2. Penerimaan pajak yang tidak dapat mencapai target padahal jumlah wajib pajak badan sudah banyak terdaftar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi KPP Pratama mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Bagi Pihak - Pihak Lainnya
   Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan gambaran yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Pengembangan Ilmu
   Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi, pemikiran dalam ilmu mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak .
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:34), pemeriksaan pajak adalah:
"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2.1.1.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak menurut Siti kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:52-56) adalah:
"Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)".

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:262) Pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut :

1. "Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal.
   Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dibedakan :
   a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
      1. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
      2. Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
      3. Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
      4. Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.
   b. Pemerikasaan lengkap
      1. Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
      2. KSO (kerja sama opersi)
      3. Konsorium
      4. Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

   Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan:
      1. 4 Bulan.
      2. Sejak terbit SP2 (surat perintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan).
      3. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
      4. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).

   Jangka waktu pemeriksaan kantor:
      1. 3 bulan
      2. Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP).
      3. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing*:

1. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali.
2. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan.
3. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email).
4. Memperhatikan jangka waktu SPT LB (lebih bayar).
5. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu.
6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor). Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan".

2.1.2 Jumlah Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Jumlah Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:75) Jumlah Wajib Pajak adalah:
"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

2.1.2.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator Jumlah Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2011) adalah sebagai berikut :
" Jumlah Wajib Pajak Terdaftar".

2.1.2.3 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Mardiasmo (2011:56) mengungkapkan mengenai kewajiban dan hak dari Wajib Pajak sebagai berikut :

a. Kewajiban Wajib Pajak :
   1. "Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
   2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
   3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
   4. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
   5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
   6. Jika diperiksa wajib:
      a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak
      b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
   7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak – hak Wajib Pajak :
   1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
   2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
   3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
   4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
   5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
   6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
   7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk meaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding".

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) Penerimaan Pajak adalah:
"Penerimaan pajak adalah Pajak Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu:
"Jumlah Penerimaan Pajak
1. Kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
4. Pelayanan.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)".

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dari tahun 2010-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

2.1.3.3 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) sebagai berikut:
"Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) sebagai berikut:
"PPN diterapkan dengan UU No.18 tahun 2007 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor- faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Erly Suandy (2011:101) mengemukakan bahwa:
"Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance,* melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa:

"Wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2: Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Alasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dan hakikat di antara variabel-variabel dan dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Selain itu, penulis menggunakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan di analisis menggunakan statistik. Sedangkan alasan penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu objek penelitian, dan penelitian ini menggunakan metode verifikatif karena bertujuan untuk meneliti ulang hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memverifikasi kebenaran hasil penelitian sebelumnya.

3.2 Operasionalisasi Variabel

3.1 Variabel Independen (X1 dan X2)

Pengertian variabel independen menurut (Sugiyono, 2012:64) menyatakan bahwa :

"Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent, dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Dalam penelitian ini variabel X_1 adalah Pemeriksaan pajak sedangkan variabel X_2 adalah jumlah wajib pajak.

3.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2012:39), variabel terikat dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Variabel Dependen adalah variabel terkait yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Sedangkan untuk variabel terikat/dependen (Y) yang digunakan adalah Penerimaan Pajak.

Agar lebih jelas, selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan perpajakan tahunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1) Penelitian Lapangan(*Field Research)*

Dalam penelitian ini penulis mengambil data-data sekunder yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Data sekunder ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Teknik Pengamatan/*Observasi*, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Sugiyono (2012:291) Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Dalam penelitian ini penulis mempelajari buku-buku, artikel, dan literatur lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang didapatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.4 Populasi, Sampel dan tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80) pengertian Populasi adalah sebagai berikut:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dari penelitian ini adalah data-data berupa jumlah SKPKB, jumlah wajib pajak, realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak periode 2010-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah :

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Kemudian menurut Tony (2013:27) sampel adalah

“Bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat”.

Sampel dalam penelitian ini adalah data-data berupa jumlah SKPKB, jumlah wajib pajak, realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak periode 2010-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya alasan penulis mengambil sampel tersebut dikarenakan terdapat permasalahan.

3.4.3 Tempat Serta Waktu Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang beralamat di Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan, Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengujian data

3.5.1 Analisis Data

A. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a. "Jika probabilitas> 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b. Jika probabilitas< 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal".

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

B. Uji Multikolinearitas

Menurut Husein Umar (2011:177) mendefinisikan uji multikolinieritas adalah:

"Untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen".

Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan.

$$VIF = \frac{1}{1 - Ri^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:179)

Menurut Gujarati (2012:362) :

"Dimana Ri^2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X_1 terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF <10 maka dalam data tidak terdapat multikolinieritas".

Menurut Husein Umar (2011:178) untuk mengatasi terjadinya multikolinieritas, dapat diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:

"Evaluasi apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau terdapat kecurangan dan kelemahan lain;

Jumlah data ditambah lagi;

Salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel independen ternyata mirip atau digabungkan jika secara konsep relatif sama; dan

Gunakan metode lanjut seperti regresi bayesian atau *regresi tolerance".*

C. Uji Heterokedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

"Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain".

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Cara pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai produksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot.*

D. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) mendefinisikan uji autokorelasi adalah :

"Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik *Durbin-Watson.*

$$D-W = \frac{\sum e_t - e_{t-1}}{\sum e_t^2}$$

Sumber: Gujarati (2012:467)

Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan secara umum terdapat pada tabel 3.3

3.6 Metode Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

   Menurut (Albert Kurniawan, 2010:52) regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

   "Analisis regresi linier berganda pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independen*/bebas dari 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan penggunaan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*)".

   Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

   Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel *dependent*, bila dua atau lebih variabel *independent* sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas

antara variabel *dependent* (Y) dan variabel *independent* (X_1 dan X_2), persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : variabel *Dependent* (Penerimaan Pajak)
X_1 : variabel *Independent* (Pemeriksaan Pajak)
X_2 : variabel *Independent* (Jumlah Wajib Pajak)
a : Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)
b_1 : koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (nilai peningkatan atau penurunan)
b_2 : Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak (nilai peningkatan atau penurunan)
e : Koefisien *Error.*

Regresi linier berganda dengan dua variabel bebas X_1 dan X_2 metode kuadrat kecil memberikan hasil bahwa koefisien-koefisien a, b_1, dan b_2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\Sigma y = na + b_1\Sigma X_1 + b_2\Sigma X_2$$

$$\Sigma X_1 y = a\Sigma X_1 + b_1\Sigma X_{12} + b_2\Sigma X_1X_2$$

$$\Sigma X_2 y = a\Sigma X_2 + b_1\Sigma X_1X_2 + b_2\Sigma X_{22}$$

Sumber : (Sugiyono, 2011:278)

Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya.

2. Koefisien Determinasi (R^2)
   Menurut (Ghozali, 2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut :
   "Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

Sumber : (Sudjana. 2003:246)

Keterangan :
Kd : Koefisien Determinasi
r^2 : Koefisien Korelasi

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya pengaruh dari pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak (variabel X) sebagai variabel bebas dengan penerimaan pajak (variabel Y) sebagai variabel terikat.

Jika terdapat pengaruh yang signifikan maka dapat di formulasikan dalam Hipotesis H_0, yaitu hipotesis untuk di tolak. Tetapi apabila kedua variabel tersebut dihipotesiskan memiliki pengaruh maka dapat di formulasikan dalam Hipotesis Alternatif H_1 yaitu hipotesis

yang di harapkan untuk di terima.

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

3. Penetapan Hipotesis

   Hipotesis Penelitian

   Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

   1) Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas Pemeriksaan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

      Ho $\beta_1 = 0$: Pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

      H_a $\beta_1 \neq 0$: Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

   2) Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas jumlah wajib pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

      Ho : $\beta_i = 0$: Jumlah wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

      H_a $\beta_1 \neq 0$: Jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

Menghitung nilai t_{hitung} dengan mengetahui apakah pengaruh variabel bebas signifikan atau tidak dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{b}{Se(b)}$$

Sumber : (Sugiyono, 2011:192)

Dimana :

b = Koefisien Regresi ganda

Se (b) = Standar eror

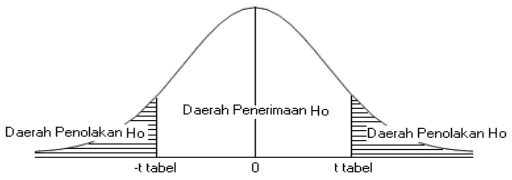
5. Menggambar daerah penerimaan dan penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria :

1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
3) t_{hitung}; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
4) t_{tabel}; dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1) atau 10-2-1=7

6. Menggambar daerah penerimaan dan penolakan



Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Untuk menarik kesimpulan dari hipotesis diatas dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan = 0.05

Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis H_0 adalah sebagai berikut:

a. Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka H_0 ada pada daerah Penolakan, berarti H_1 diterima atau ada artinya pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
b. Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka H_0 ada pada daerah Penerimaan, berarti H_1 ditolak atau tidak ada artinya pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015

Jumlah kontribusi terkecil untuk pemeriksaan pajak terdapat pada tahun 2012 dengan kontribusi sebesar 27,33%.

Untuk melihat perkembangan Kontribusi Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada gambar 4.1.

4.1.1.2 Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015

Jumlah kontribusi terkecil untuk jumlah wajib pajak terdapat pada tahun 2011 dengan kontribusi sebesar 26,29%.

Untuk melihat perkembangan Kontribusi terhadap jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada gambar 4.2.

4.1.1.3 Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015

Pencapaian target penerimaan pajak terendah terdapat pada tahun 2011 dengan jumlah pencapaian sebesar 52%.

Untuk melihat perkembangan Penerimaan Pajak Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada gambar 4.3.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah adalah model yang heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanngaran heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan metode *scatter plot* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika ada pola tertentu seperti titik-titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas
2. jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.4

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Model regresi yang baik yaitu tidak terdapatnya multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk melihat nilai multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.5.

4. Uji Autokorelasi

Uji auokorelasi, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Jika terjadi korelasi, maka diketahui bahwaterdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena kesalahan penganggu (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi adanya tidaknya pelanggaran autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan criteria sebagai berikut:

1. Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.
2. Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.
3. Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.7.

4.1.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*)

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

a : Konstanta
Y : Penerimaan Pajak
X_1 : Pemeriksaan Pajak
X_2 : Jumlah Wajib Pajak
b_1 dan b_2: Koefisien regresi

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

4.1.2.3 Analisis Korelasi

1. Analisis Korelasi Antara Dana Pihak Ketiga Dengan penyaluran Kredit Konsumsi

Nilai korelasi yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,888. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2012, walaupun pemeriksaan sudah dilakukan namun penerimaan tidak dapat mencapai target, hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang ada menurut teori semakin baik pemeriksaan pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak (Erly Suandy, 2011:101) . Berdasarkan interpretasi koefisen korelasi, nilai sebesar 0,888 termasuk kedalam kategori hubungan yang sangat tinggi, berada dalam kelas interval antara 0,81 – 1,000.

2. Analisis Korelasi Antara Kebijakan *Loan to Value* Dengan penyaluran Kredit Konsumsi

Nilai korelasi yang diperoleh antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,063. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2012, walaupun jumlah wajib pajak sudah banyak namun penerimaan tidak dapat mencapai target, hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang ada menurut teori semakin banyak jumlah wajib pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2011:7). Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,063 termasuk kedalam kategori hubungan yang sangat lemah, berada dalam kelas interval antara 0,00 – 0,199.

Hasil dari analisis korelasi dapat dilihat pada tabel 4.9.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil dari analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak (X_1) memberikan kontribusi paling dominan terhadap penerimaan pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 80,9%, sedangkan 1,1% lainnya diberikan oleh jumlah wajib pajak (X_2), lainnya merupakan konstribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini diantaranya adalah tarif pajak, pemahaman wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan.

Hasil dari analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

A. Pengujian Hipotesis Pertama Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

Diketahui bahwa nilai t_{hitung} $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh pemeriksaan pajak sebesar 3,688. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distrbusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=6-2-1= 3, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar 3,182. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 3,688, berada diluar nilai t_{tabel} (-3,182 dan 3,182) sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2010-2015. Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.13.

B. Pengujian Hipotesis Kedua Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

Diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh jumlah wajib pajak sebesar 0,727. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distrbusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=6-2-1= 3, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar 3,182. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 0,727, berada diantara nilai t-tabel (-3,182 dan 3,182) sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2010-2015.Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.14.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya adalah sebesar 0,888. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Dimana semakin tinggi pemeriksaan pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,888 termasuk kedalam kategori hubungan yang sangat tinggi, berada dalam kelas interval antara 0,81 – 1,000.

Hasil pengujian hipotesis antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai t_{hitung} yang diperoleh 3,688 berada diluar dari nilai t_{tabel} (-3,182 dan 3,182) sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak. Artinya, jika pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat.

Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu 80,9% dan sisanya 19,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tarif pajak, pemahaman wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan.

Fenomena pemeriksaan pajak yang terjadi yaitu, pada tahun 2016 salah satu penyebab gagalnya pencapaian target ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DitJen Pajak, seharusnya perusahaan tersebut masih bisa mendapat untung Bambang Brodjonegoro (2016). Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Majalaya adalah 13.448.132.575 sedangkan jumlah tunggakan pajak lebih besar dari pemeriksaan pajak 25,193,398,785, namun disisi penerimaan pajak jumlah realisasinya dapat melebihi target penerimaan pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 35.328.906.102 dan jumlah target penerimaan pajak sebesar 31.098.303.927, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan pengemplang pajak mengaku terus merugi sehingga mereka tidak berkewajiban untuk membayar pajak.

Maka dari itu agar para wajib pajak mau membayar pajak dan patuh dalam membayar pajak, maka diharapkan agar dilakukannya upaya-upaya penegakan hukum seperti pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak

Hasil penelitian juga didiukung oleh landasan teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:101) pada halaman 16. Juga didukung oleh hasil penelitian dilakukan oleh Ines Idzaayasha (2015) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung. Dapat disimpulkan semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bandung. Wildaniashri (2013) juga menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak dan menunjukan jika pemeriksaan pajak dilakukan maka akan menurunkan terhadap penerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya adalah sebesar 0,063. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Dimana semakin banyak jumlah wajib pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,063 termasuk kedalam kategori hubungan yang sangat lemah, berada dalam kelas interval antara 0,00 – 0,199.

Hasil pengujian hipotesis antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai t_{hitung} yang diperoleh 0,727 berada diluar dari nilai t_{tabel} (-3,182 dan 3,182) sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Majalaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak. Artinya, jika jumlah wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat.

Besarnya pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak yaitu 1,1% dan sisanya 98,9% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tarif pajak, pemahaman wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan.

Fenomena jumlah wajib pajak yanng terjadi yaitu, pada tahun 2015 permasalahan klasik tidak tercapainya target penerimaan pajak karena Indonesia terlalu bergantung pada wajib pajak badan atau perusahaan (Darmin Nasution, 2015). Sedangkan dari fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada tahun 2015 jumlah wajib pajak sebanyak 5242 dengan jumlah wajib pajak yang melapor SPT hanya berjumlah 1551 namun disisi penerimaan pajak jumlah realisasinya dapat melebihi target penerimaan pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 35.328.906.102 dan jumlah target penerimaan pajak sebesar 31.098.303.927, hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan PPN.

Jika Indonesia hanya bergantung pada wajib pajak badan saja maka hal tersebut tidak akan mengoptimalkan penerimaan pajak, maka diharapkan diberikannya pengetahuan dan sosialisasi dari pegawai pajak terhadap para wajib pajak untuk mengingatkan betapa pentingnya pembayaran pajak karena dengan semakin bertambahnya wajib pajak juga diikuti dengan kepatuhan wajib pajak tersebut maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian juga didiukung oleh landasan teori dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:7) pada halaman 17. Dalam mengatasi masyarakat yang belum mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak petugas pajak berhak melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, karena ada dua cara untuk menaikan potensi penerimaan pajak, yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Dengan melihat hasil penelitian, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia masih mempunyai ruang untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya (Nufransa Wira Sakti, 2014:158).

Hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian Belinda Nibenia Laoli (2015) menyatakan bahwa Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Majalaya periode 2010-2015, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebesar 80,9%. Artinya, ketika pemeriksaan pajak meningkat, maka penerimaan pajak akan meningkat. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh banyak perusahaan yang masih tidak mau membayar pajak padahal telah dilakukan pemeriksaan oleh DitJen Pajak.
2. Jumlah wajib pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebesar 1,1%. Artinya, ketika jumlah wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak akan meningkat. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena Indonesia terlalu bergantung pada jumlah wajib pajak badan saja.

5.2 Saran

1. Saran Operasional

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Diharapkan agar dilakukannya upaya-upaya penegakan hukum seperti pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. Juga diharapkan diberikannya pengetahuan dan sosialisasi dari pegawai pajak terhadap para wajib

pajak untuk mengingatkan betapa pentingnya pembayaran pajak karena dengan semakin bertambahnya wajib pajak juga diikuti dengan kepatuhan wajib pajak tersebut maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk mengetahui pentingnya membayar pajak demi pemasukkan kas Negara dan kelangsungan pembangunan negara.

2. Saran Akademis

1. Saran Pengembangan Ilmu

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi keuangan di bidang perpajakan, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain agar penelitian-penelitian selanjutnya menambah keberagaman hasil penelitian dan melahirkan pengetahuan yang baru.

2. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Martowardojo. 2016. Gubernur BI: Dana Asing Mengalir Deras. Beritasatu. Melalui http://www.beritasatu.com/ekonomi/372613-gubernur-bi-dana-asing-mengalir-deras.html

Albert Kurniawan. 2010. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. 2016. Defisit Diperkecil, Pemerintah Yakin Ekonomi Tumbuh 5,2 Persen. Katadata. Melalui http://katadata.co.id/berita/2016/06/20/defisit-diperkecil-pemerintah-yakin-ekonomi-tumbuh-52-persen

Bambang Brodjonegoro. 2016. *2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun*. Katadata. Melalui http://katadata.co.id/berita/2016/03 /22/2000-perusahaan-asing-tak-bayar-pajak-negara-rugi-rp-500-triliun#sthas h.H3LBVIGd. dpbs

Bambang Brodjonegoro. 2016. 3 Penyebab Penerimaan Pajak RI Selalu di Bawah Target. Bisnis Liputan6. Melalui http://bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target

Darmin Nasution. 2015. *Pemerintah Ingin Revisi Target Pajak 2016*. Republika. Melalui http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/15/12/19/nzl lk41-pemerintah-ingin-revisi-target-pajak-2016

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Fuad Rachmany. 2013. *Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaaan Pajak Rendah*. Berita Satu. Melalui http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak-rendah.html

Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C. Jakarta: Salemba Empat.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Iwan Satibi. 2011. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Rajawali pers.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Jonathan Sarwono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

J.R Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ken Dwijugiasteadi. 2016. Ditjen Pajak Bidik Peningkatan Wajib Pajak Lewat e-Filling. Cnnindonesia. Melalui http://www.cnnindonesia.com/ekonomi /20160318191518-78-118397/ditjen-pajak-bidik-peningkatan-wajib-pajak-lewat-e-filling/

Ken Dwijugiasteadi. 2016. Ini Strategi Pemerintah Tingkatkan Wajib Pajak Pribadi. Bisnis news Viva. Melalui http://bisnis.news.viva.co.id/news/read /753279-ini-strategi-pemerintah-tingkatkan-wajib-pajak-pribadi

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011.*Perpajakan Edisi Revisi*. 2011. Yogyakarta.C.V Andi Offset.

Mashuri. 2008. *Metode Analisis Verifikatif dan Cara Menentukanya*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

M. Suparmoko. 2013. *Keuangan Negara* . Yogyakarta: BPFE.

Nufransa Wira Sakti. 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce dari mendaftar sampai membayar*. Ciganjur. Visimedia

Nurbaeti. 2016. KPP Pratama Gelar Sosialisasi Pajak. Pontianakpost. Melalui http://www.pontianakpost.com/kpp-pratama-gelar-sosialisasi-pajak

Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia* :Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Graha Ilmu.

Simanjuntak,H.Timbul dan Imam Mukhlis.2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Singgih Santoso. 2012. *Statistik Parametik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Soemarso,S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.

Sudjana. 2003. *Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi*. Bandung. Tarsito.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung dan Devi. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Semarang: Gratama Publishing.

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Uma Sekaran. 2011. *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya.* Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.* 2013. Jakarta.

____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*. 2014. Jakarta.

http://www.eurekapendidikan.com/2014/12/kajian-pustaka.html

LAMPIRAN

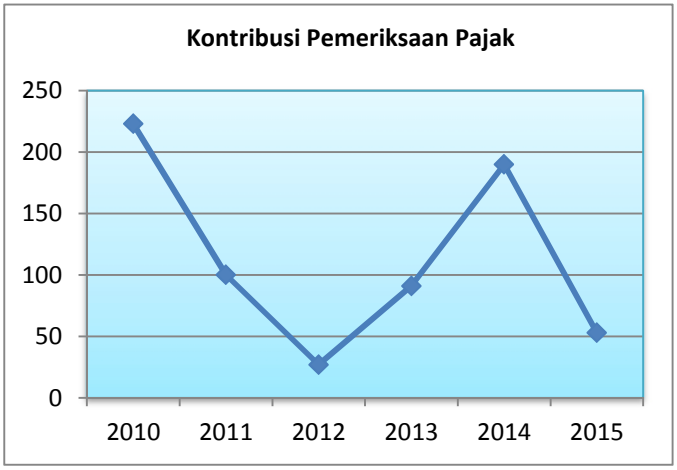
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak	"Hasil pemeriksaan dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar lebih kecil atau sama dengan yang telah dilaporkan wajib pajak dari hasil pemeriksaan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik berupa SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) maupun SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)". Soemarso S.R (2007:116)	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Siti kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:52-56)	Rasio
Jumlah Wajib Pajak	"Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008". Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29)	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Siti Resmi (2011)	Rasio
Penerimaan Pajak	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. (John Hutagaol, 2007:325)	Realisasi Penerimaan Pajak x 100% Target Penerimaan Pajak (John Hutagaol, 2008:325)	Rasio

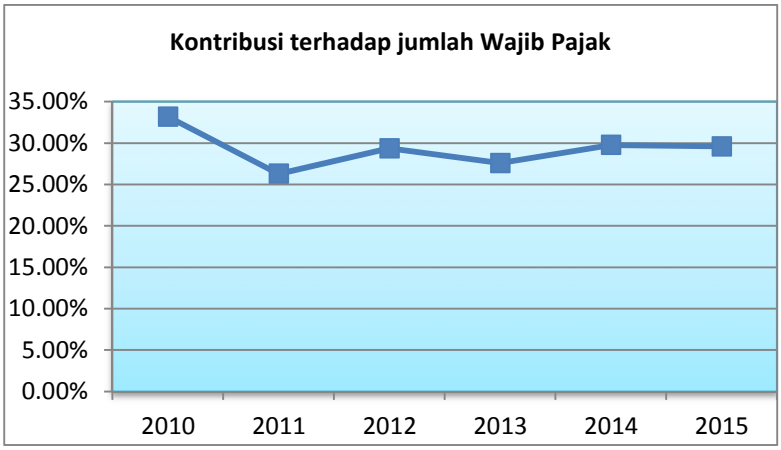
Tabel 3.4
Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0 - 0.20	Sangat rendah
0.21 - 0.40	Korelasi yang lemah
0.41 - 0.60	Korelasi sedang
0.61 - 0.80	Cukup tinggi

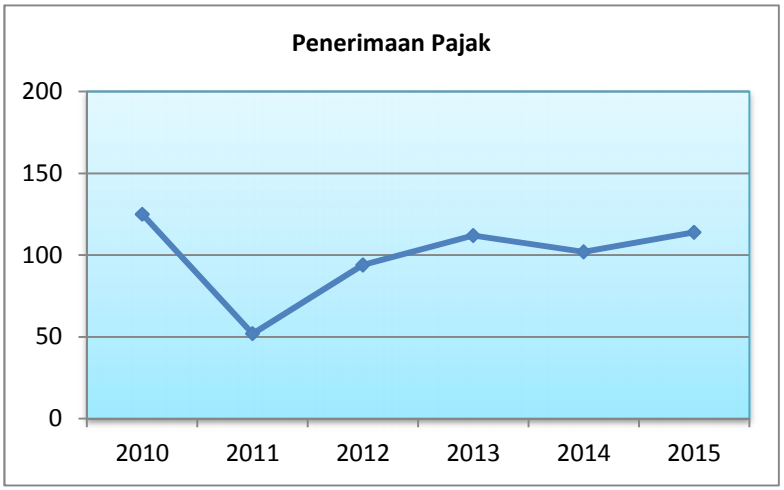
Sumber : Sugiyono (2013 : 250)



Gambar 4.1
Kontribusi Pemeriksaan Pajak Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015



Gambar 4.2
Kontribusi Terhadap Jumlah Wajib Pajak Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015



Gambar 4.3
Perkembangan Penerimaan Pajak Selama 6 Periode Tahun 2010 – 2015

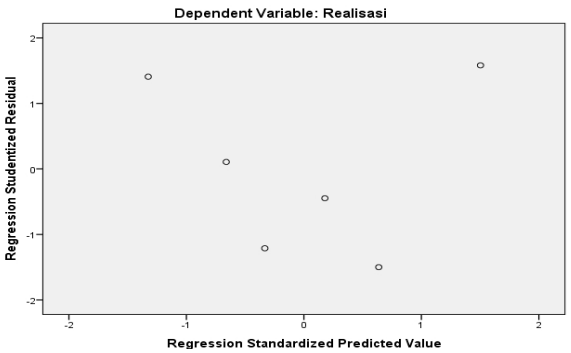
Tabel 4.4.
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.43194332
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.196
	Negative	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		.495
Asymp. Sig. (2-tailed)		.967

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak	.984	1.017
	Jumlah WP	.984	1.017

a. Dependent Variable: Realisasi

Tabel 4.6
Kriteria Pengujian Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada auto korelasi positif	Tolak	0<d<Cl
Tidak ada auto korelasi positif	*No Decision*	dl≤d≤du
Tidak ada korelasi negative	Tolak	4dl<d<4
Tidak ada korelasi negative	*No Decision*	4du≤d≤4dl
Tidakada auto korelasi positif atau negative	Tidak ditolak	du<d<4du

Sumber: Gurajati (2012:470)

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906[a]	.820	.700	5.72161	1.900

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Realisasi

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.718	23.128		-.723	.522
	Pemeriksaan Pajak	1.317	.357	.911	3.688	.035
	Jumlah WP	3.310	4.552	.180	.727	.520

a. Dependent Variable: Realisasi

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi

Correlations

		Realisasi
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	.888
	Sig. (2-tailed)	.018
	N	6
Jumlah WP	Pearson Correlation	.063
	Sig. (2-tailed)	.906
	N	6

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906[a]	.820	.700	5.72161

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP, Pemeriksaan Pajak

Tabel 4.12
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pemeriksaan Pajak	.911	.888
	Jumlah WP	.180	.063

a. Dependent Variable: Realisasi

Tabel 4.13
Pengujian Hipotesis X_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.718	23.128		-.723	.522
	Pemeriksaan Pajak	1.317	.357	.911	3.688	.035
	Jumlah WP	3.310	4.552	.180	.727	.520

a. Dependent Variable: Realisasi

Tabel 4.14
Pengujian Hipotesis X_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.718	23.128		-.723	.522
	Pemeriksaan Pajak	1.317	.357	.911	3.688	.035
	Jumlah WP	3.310	4.552	.180	.727	.520

a. Dependent Variable: Realisasi